

Asesmen dan Mitigasi Konflik di Tengah Pandemi COVID-19 di Indonesia

Oleh

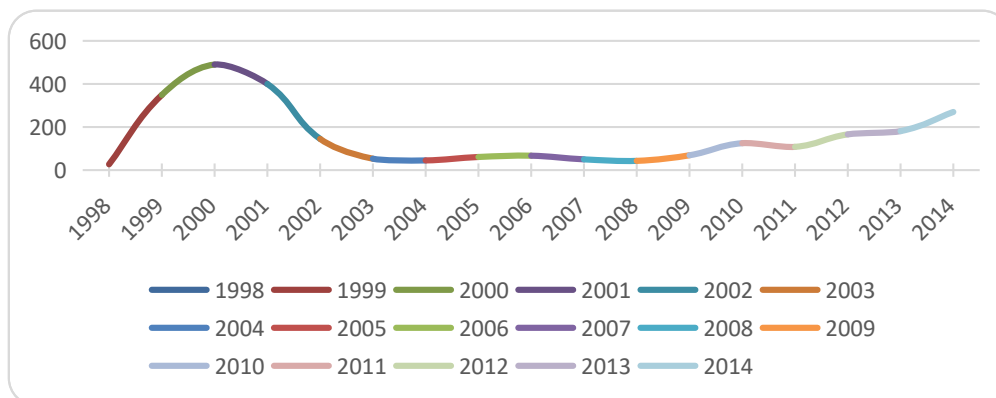
Mohammad Hasan Ansori

Direktur Program dan Riset di The Habibie Center
ansori@habibiecenter.or.id

Pendahuluan

Konflik sebagai salah satu fenomena universal merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan. Semua hubungan kemanusiaan atau kemasyarakatan tidak bisa mengelak dari konflik. Konflik selalu hadir dan inheren dalam setiap hubungan kemanusiaan dan sistem sosial,¹ baik dalam kondisi kehidupan normal atau kondisi darurat seperti pandemi COVID-19 saat ini atau dalam berbagai bentuk bencana lainnya, termasuk bencana alam. Fenomena konflik dan kekerasan seperti demikian sudah muncul berabad-abad dan sudah menjadi salah satu agenda global. Para analis konflik secara umum menganggap Indonesia, Myanmar, dan Filipina sebagai negara-negara di ASEAN yang memiliki sejarah panjang konflik kekerasan dengan dampak yang begitu besar, baik dari kematian, cedera, maupun kerusakan bangunan.²

Grafik 1: Konflik Kekerasan terkait dengan Identitas di Indonesia (1998-2014)



Sumber: The Habibie Center, program *National Violence Monitoring System* (NVMS)



Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 telah menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan virus corona sebagai kebijakan pencegahan dan mitigasi COVID-19, meskipun sebagian besar provinsi dan kabupaten/kota telah banyak melakukan inisiatif dini dalam bentuk karantina mandiri wilayah masing-masing dengan memberlakukan kebijakan "*work from home*" (bekerja dari rumah) dan "*stay at home*" (diam di rumah). Seiring dengan pemberlakuan kebijakan pencegahan dan mitigasi COVID-19 tersebut, beberapa konflik dan kekerasan ternyata telah muncul ke permukaan di tengah pandemi COVID-19, baik sebagai dampak langsung maupun tidak langsung atas pemberlakuan kebijakan/tindakan tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian di bawah ini dan beberapa tawaran opsi mitigasi konflik kekerasan tersebut.

Asesmen dan Strategi Mitigasi Konflik Kekerasan di Tengah Pandemi COVID-19

Asesmen atau analisis terhadap konflik di tengah pandemi COVID-19 secara analitis dapat dibagi menjadi tipe konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal merujuk pada konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau yang melibatkan unsur pemerintah dengan semua bentuk aparaturnya, sedangkan tipe horizontal merujuk pada konflik yang terjadi antar masyarakat sendiri atau ketika masyarakat bertikai antara mereka sendiri.

Tipe konflik vertikal pertama pada situasi pandemi ini adalah konflik antara masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan aparat keamanan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% atau sekitar 70 juta orang tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal,³ khususnya sebagai pedagang kecil atau pedagang kaki lima, ojek *online* dan konvensional, asisten rumah tangga, tukang becak, dan sebagainya. Karakter khas dari para pekerja di sektor informal ini adalah penghasilan mereka yang bersifat harian. Pembatasan kegiatan di luar rumah dan himbauan "*stay at home*" mengakibatkan mereka tidak bisa bekerja lagi, yang mengakibatkan mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk makan pada hari itu.⁴ Banyak di antara mereka yang tetap bersikeras untuk melakukan pekerjaan mereka di sektor informal, khususnya pedagang kaki lima, hanya untuk sekedar mencari makan dan bertahan hidup di tengah pandemi ini. Akibatnya, konflik seringkali terjadi antara mereka dengan aparat keamanan atau penegak hukum yang merazia mereka demi pencegahan dan mitigasi COVID-19.

Kisruh pedagang kaki lima dengan aparat keamanan di Tanah Abang pada tanggal 27 Maret 2020 adalah di antara contoh kasus yang mencolok.⁵ Mengingat kejadian di Tanah Abang ini seringkali





berulang, mitigasi konflik kekerasan ini sebaiknya dilakukan dengan memprioritaskan pendekatan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Aparat keamanan sebaiknya bertindak secara lebih proaktif dengan melakukan negosiasi dan dialog dengan para pekerja di sektor informal tersebut dan menjelaskan secara baik terkait ancaman COVID-19, serta menghindari penggunaan kekerasan semaksimal mungkin. Selain itu, sebagai bagian dari kompensasi untuk para pekerja di sektor informal, pemerintah berkewajiban untuk memperkuat jaring pengaman sosial (*social safety-net*) mereka.⁶

Konflik kekerasan vertikal yang kedua merujuk pada meningkatnya kriminalitas di tengah pandemi ini. Ada dua asumsi penting untuk menjelaskan meningkatnya kriminalitas ini. Pertama, kebijakan pencegahan dan mitigasi COVID-19 yang banyak bertumpu pada pembatasan kegiatan di luar rumah telah berdampak cukup hebat pada stabilitas ekonomi mayoritas masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Akibat kebijakan tersebut, tidak sedikit di antara mereka kemudian melakukan tindak kriminal sebagai jalan pintas.⁷ Kedua, sebagai bagian dari kebijakan pencegahan dan mitigasi COVID-19, pemerintah juga telah membebaskan lebih dari 30.000 narapidana.⁸ Para napi yang mendapatkan asimilasi tersebut bukan hanya belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap ketika keluar dari penjara, tapi pada saat yang bersamaan, mereka juga langsung dihadapkan pada kenyataan sulitnya mencari kerja dan penghasilan karena kebijakan mitigasi COVID-19. Mereka kemudian mengambil jalan pintas dengan melakukan kriminalitas kembali untuk mencari makan.⁹ Sejauh ini, pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memperkirakan lebih dari 27 napi asimilasi telah melakukan kriminalitas kembali.¹⁰ Terkait mitigasi kriminalitas ini, penekanan secara kuat lebih ditujukan pada aspek penegakan hukum (*rule of law*) secara lebih serius dan tegas, daripada ADR.

Pola konflik vertikal ketiga adalah munculnya beberapa serangan terorisme di tengah COVID-19. Di tengah konsentrasi dan fokus besar pemerintah dan aparat keamanan saat ini untuk mencegah dan menangani COVID-19, kelompok teroris mencoba memanfaatkan momen tersebut untuk melancarkan serangan. Kelompok teroris telah melihat ruang yang cukup longgar akibat sumber daya negara lebih dimaksimalkan untuk menangani COVID-19. Salah satu kasus serangan terorisme di tengah COVID-19 yang banyak mendapatkan perhatian adalah penembakan yang dilakukan oleh dua orang teroris dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT).¹¹ Terkait mitigasi terorisme ini, masih sama dengan kriminalitas, penekanan secara kuat lebih ditujukan pada aspek penegakan hukum secara lebih serius dan tegas, sebagaimana yang sudah diatur secara legal-konkret dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme.

Tipe konflik vertikal keempat terkait dengan distribusi bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sumber konflik ini secara khusus merujuk pada distribusi bantuan sosial tersebut



yang tidak merata dan tepat sasaran. Contoh kasus penting terkait ini adalah penolakan para kepala desa di Kabupaten Sukabumi atas bantuan sosial gubernur Jawa Barat. Mereka beranggapan bahwa data penerima bantuan sosial tersebut banyak tumpang tindih dan tidak tepat sasaran.¹² Pendekatan ADR sebaiknya diprioritaskan untuk mitigasi konflik ini, khususnya dalam bentuk dialog dan klarifikasi terkait data masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan sosial agar tepat sasaran.

Tipe konflik selanjutnya adalah horizontal. Bentuk pertama tipe ini adalah penolakan warga atas penguburan korban COVID-19 di wilayahnya. Akibat maraknya kasus tersebut, pemerintah pusat dan daerah dan berbagai organisasi sosial-keagamaan bahkan ikut turun tangan untuk meredakan konflik ini. Salah satu kasus penolakan penguburan korban COVID-19 yang banyak mendapatkan perhatian secara luas adalah yang terjadi di Banyumas, Jawa Tengah.¹³

Tipe konflik horizontal kedua yang tidak kalah heboh adalah penolakan warga atas tenaga medis COVID-19 untuk tinggal atau menetap di sekitar wilayah mereka atau mengucilkan mereka jika tetap tinggal di wilayahnya. Salah satu kasus konflik ini yang banyak mendapatkan perhatian dan pemberitaan nasional adalah penolakan tenaga kerja medis COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan oleh lingkungan domisili tinggal mereka di Jakarta Timur yang terjadi sejak 22 Maret 2020.¹⁴ Mendahulukan ADR, yaitu negosiasi, dialog dan mediasi dan menghindari jalur hukum, sebaiknya digunakan untuk mitigasi konflik ini, kecuali terhadap mereka yang sengaja menggunakan isu tersebut untuk memprovokasi masyarakat dan membuat kerusuhan.

Tipe horizontal ketiga merujuk pada konflik yang terjadi antara buruh dengan pengusaha terkait dengan hak-hak buruh/karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Data Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan melaporkan bahwa terdapat 2,8 juta tenaga kerja terkena dampak pandemi COVID-19 per 13 April 2020.¹⁵ Pendekatan yang sama juga sebaiknya diberlakukan untuk mitigasi konflik ini. Jalur hukum dengan merujuk pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sebaiknya diberlakukan ketika jalur ADR mengalami jalan buntu.

Analisis

Seiring pelaksanaan kebijakan pencegahan dan mitigasi COVID-19, berbagai konflik kekerasan muncul ke permukaan, baik vertikal maupun horizontal. Beberapa konflik telah melibatkan dimensi kekerasan dan penuh agresivitas dan beberapa lainnya tidak. Pemerintah dan para pemangku kepentingan





THC INSIGHTS

No. 16 / 04 Mei 2020
www.habibiecenter.or.id

terkait lainnya harus segera melakukan langkah-langkah strategis dan terukur untuk mencegah dan menangani berbagai konflik kekerasan tersebut. Jika konflik kekerasan tersebut tidak ditangani segera dengan baik, tepat dan efisien, dikhawatirkan akan ikut berperan dalam mengganggu proses penanganan COVID-19 yang sedang berlangsung dan semakin berat ini, khususnya jika merujuk pada semakin bertambahnya jumlah kasus positif COVID-19. Dalam mitigasi konflik kekerasan ini, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan secara bijak dan mengukur secara cermat untung-rugi (*cost-benefit*) dua pendekatan mitigasi konflik kekerasan di atas, yaitu ADR dan legal.



Endnotes

- 1 Luis A. Coser, *Continuities in the study of social conflict*. New York: The Free Press, halaman 25; Christopher.W. Moore, *The Mediation Process: practical strategies for resolving conflict*. San Francisco: Josse-Bass, 2003, halaman 3; Ralf Dahrendorf, *Conflict after class: new perspectives on the theory of social and political conflict*, halaman 3.
 - 2 Luca Mancini, *Horizontal inequality and communal violence: evidence from Indonesian districts*. In Stewart, F. (ed.). *Horizontal inequalities and conflict: understanding group violence in multiethnic societies*, 2008, halaman 112. Lihat juga Michail L. Ross, *Resources and rebellion in Aceh, Indonesia*. In Collier, P. & Sambanis, N. (eds.). *Understanding civil war: evidence and analysis*, halaman 36.
 - 3 Lokadata (Undated). 'Jumlah pekerja formal dan informal, 2012-2019'. Diunduh dari <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-pekerja-formal-dan-informal-2012-2019-1565591307#>
 - 4 CNN Indonesia (2020, Maret 24). 'Keluhan Pedagang Pasar Kehilangan Omzet Karena Virus Corona'. Diunduh dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200323180528-92-486184/keluhan-pedagang-pasar-kehilangan-omzet-karena-virus-corona>
 - 5 Liputan6.com (2020, Maret 27). 'Pasar Tanah Abang Ditutup Akibat Corona, PKL Nekat Berjualan Dibubarkan Satpol PP'. Diunduh dari <https://www.liputan6.com/news/read/4212736/pasar-tanah-abang-ditutup-akibat-corona-pkl-nekat-jualan-dibubarkan-satpol-pp>
 - 6 Terkait dengan berbagai pendekatan mitigasi konflik ini, silahkan lihat Bernard Mayer, *The dynamics of conflict resolution: a practitioner's guide*, 2000, dan Christopher.W. Moore, *The Mediation Process: practical strategies for resolving conflict*. San Francisco: Josse-Bass, 2003; Roger Fisher dan William Ury, *Getting to yes: negotiating agreement without giving in*, 1991.
 - 7 Republika.co.id (2020, April 23). 'Wabah Covid-19 dan Kriminalitas'. Diunduh dari <https://republika.co.id/berita/q98ji4318/wabah-covid19-dan-kriminalitas>
 - 8 Kompas.com (2020, April 12). 'Pembebasan 30.000 Narapidana akibat Wabah Virus Corona'. Diunduh dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/09314561/pembebasan-30000-narapidana-akibat-wabah-virus-corona>
 - 9 Kompas.com (2020, April 19). 'Mengapa Napi Asimilasi Kembali Berbuat Kriminal? Ini Analisisnya...'. Diunduh dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/130400565/mengapa-napi-asimilasi-kembali-berbuat-kriminal-ini-analisisnya>
 - 10 Kompas.com (2020, April 21). 'Polri: 27 Napi yang Bebas Lewat Asimilasi Covid-19 Kembali Lakukan Kejahatan'. Diunduh dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/21/15431491/polri-27-napi-yang-bebas-lewat-asimilasi-covid-19-kembali-lakukan-kejahatan>
 - 11 Kompas.com (2020, Maret 15). 'Teroris Penembak Polisi di Poso Berhasil Ditangkap, Keduanya Tewas'. Diunduh dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/15/13510841/teroris-penembak-polisi-di-poso-berhasil-ditangkap-keduanya-tewas>
 - 12 Detiknews.com (2020, April 29). 'Kades di Sukabumi Klarifikasi soal Penolakan Paket Bantuan Ridwan Kamil'. Diunduh dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4995768/kades-di-sukabumi-klarifikasi-soal-penolakan-paket-bantuan-ridwan-kamil>
 - 13 Detiknews.com (2020, April 16). 'PNS-Perangkat Desa Jadi Tersangka Penolakan Jenazah COVID-19 di Banyumas'. Diunduh dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4978870/pns-perangkat-desa-jadi-tersangka-penolakan-jenazah-covid-19-di-banyumas>
 - 14 Tirto.id (2020, Maret 26). 'Anies Siapkan Hotel untuk Istirahat Tenaga Medis Tangani Corona'. Diunduh dari <https://tirto.id/anies-siapkan-hotel-untuk-istirahat-tenaga-medis-tangani-corona-eHMT>
 - 15 Dwi Hadya Jayani (2020, April 18). 'Wabah PHK akibat COVID-19'. Diunduh dari <https://katadata.co.id/info-grafik/2020/04/18/wabah-phk-akibat-covid-19>, 28 April 2020.
- Bramasta, D. B. (2020, March 31). "Virus Corona, Korea Selatan, dan Bantuan Rp. 13 Juta untuk Warganya." Kompas. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/090200765/virus-corona-korea-selatan-dan-bantuan-rp-13-juta-untuk-warganya?page=2>



THC INSIGHTS

THC Insights are timely and policy-relevant analysis of current political, economic and socio-cultural issues affecting Indonesia and the region. The expert observations and recommendations are produced by researchers at The Habibie Center. Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily represent those of The Habibie Center.

The Habibie Center was founded by Bacharuddin Jusuf Habibie and family in 1999 as an independent, non-government, non-profit organisation. The vision of The Habibie Center is to create a structurally democratic society founded on the morality and integrity of cultural and religious values. The mission of The Habibie Center are first, to establish a structurally and culturally democratic society that recognizes, respects, and promotes human rights by undertaking study and advocacy of issues related to democratization and human rights, and second, to increase the effectiveness of the management of human resources and the spread of technology.

Contact:

The Habibie Center

Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560

Tel: +62 21 781 7211 | Fax: +62 21 781 7212

Email: thc@habibiecenter.or.id

Website: www.habibiecenter.or.id